RINGKASAN

AGUS RINALDI SAHPUTRA
190510250

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN DALAM ACARA TRADISI PACUAN KUDA (STUDI PENELITIAN DI KABUPATEN BENER MERIAH)
(Zulfan, S.H., M.Hum dan Dr. Budi Bahreisy, S.H., M.H)

Tradisi pacuan kuda merupakan kegiatan sosial dan budaya masyarakat Kabupaten Bener Meriah, tetapi dalam pelaksanaannya masih ditemukan praktik perjudian berupa taruhan. Perbuatan tersebut dilarang berdasarkan Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum. Permasalahan penelitian ini adalah penerapan hukum terhadap perjudian dan upaya pemerintah dalam menanganinya pada acara tradisi pacuan kuda di Kabupaten Bener Meriah.

Metode penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan lapangan, bersifat deskriptif, menggunakan data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan. Wawancara dilakukan dengan Kepolisian, Satpol PP dan WH, Dinas Syariat Islam, serta Kejaksaan Negeri Bener Meriah. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan penerapan dan proses penegakan hukum terhadap praktik perjudian dalam acara tradisi pacuan kuda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum terhadap tindak pidana perjudian di Kabupaten Bener Meriah telah memiliki dasar hukum yang jelas, antara lain Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum. Upaya penegakan hukum dilakukan melalui tindakan preventif berupa pengawasan, sosialisasi, pembinaan, imbauan, dan koordinasi antarinstansi serta tindakan represif berupa pemeriksaan, penyelidikan, penyidikan, penertiban, dan penuntutan apabila terpenuhi unsur tindak pidana dan alat bukti yang sah. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan personel, banyaknya masyarakat yang hadir, praktik perjudian yang dilakukan secara tersembunyi, serta masih adanya sebagian masyarakat yang menganggap taruhan sebagai bagian dari kegiatan pacuan kuda.

Oleh karena itu, pemerintah daerah dan aparat penegak hukum perlu meningkatkan pengawasan, koordinasi, serta sosialisasi kepada masyarakat agar tradisi pacuan kuda tetap dapat dilestarikan tanpa disertai praktik perjudian.

Kata Kunci: Penegakan Hukum; Perjudian; Pacuan Kuda.

SUMMARY

AGUS RINALDI SAHPUTRA
190510250

LAW ENFORCEMENT AGAINST GAMBLING CRIMINAL ACTS IN TRADITIONAL HORSE RACING EVENTS (A RESEARCH STUDY IN BENER MERIAH REGENCY)
(Zulfan, S.H., M.Hum dan Dr. Budi Bahreisy, S.H., M.H)

The traditional horse racing event is a social and cultural activity of the people of Bener Meriah Regency; however, gambling practices in the form of betting are still found in its implementation. Such acts are prohibited under Aceh Qanun Number 12 of 2025 concerning the Amendment to Aceh Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law, as well as Bener Meriah Regency Qanun Number 2 of 2018 concerning Public Order. The problems examined in this research concern the application of the law to gambling practices and the efforts undertaken by the government to address gambling in traditional horse racing events in Bener Meriah Regency.

*This research employs an empirical juridical legal research method using a statutory approach (*statute approach*) and a field approach. The research is descriptive in nature and uses primary and secondary data obtained through interviews and library research. Interviews were conducted with the Police, the Civil Service Police Unit and Wilayatul Hisbah (Satpol PP and WH), the Office of Islamic Law (Dinas Syariat Islam), and the Bener Meriah District Prosecutor's Office. The data obtained were analyzed qualitatively to describe the application and enforcement process of the law against gambling practices in traditional horse racing events.*

The results of the research indicate that the application of law against gambling offenses in Bener Meriah Regency has a clear legal basis, including Aceh Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law and Bener Meriah Regency Qanun Number 2 of 2018 concerning Public Order. Law enforcement efforts are carried out through preventive measures, including supervision, socialization, guidance, appeals, and inter-agency coordination, as well as repressive measures in the form of examination, investigation, inquiry, enforcement, and prosecution when the elements of a criminal offense and sufficient legal evidence have been established. However, its implementation still faces obstacles, including limited personnel, the large number of people attending the events, gambling practices carried out secretly, and the perception among some members of the community that betting is part of the horse racing tradition.

Therefore, local governments and law enforcement officials need to strengthen supervision, coordination, and public legal education so that the traditional horse racing event can continue to be preserved without being accompanied by gambling practices.

Keywords: *Law Enforcement; Gambling; Horse Racing.*